

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) KELURAHAN BUGIS
PRIODE TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA	TANGGAL LAPOR	JENIS PELAPORAN	Status LHKPN Oleh KPK
1	Lurah Kelurahan Bugis	MULYADI,SE	31/12/2024	Periodik	Diterima
2	Sekretaris Kelurahan Bugis	-	-	-	-
3	Kasi Pemerintahan Keamanan dan Trantib	NUR KAYANI HATUWE,S.Sos	31/12/2024	Periodik	Diterima
4	Kasi Ekonomi Dan Pembangunan	NURAINA,SE	31/12/2024	Periodik	Diterima
5	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat	ERMI RUSWANTI,SP	31/12/2024	Periodik	Diterima



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYADI
2. Jabatan : LURAH BUGIS
3. NHK : 475781

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KOTA SAMARINDA
, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 199.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1.5 A MT CKD Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.812.070

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 515.812.070

III. HUTANG Rp. 20.756.420

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 495.055.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NUR AINA
NIK : 6472055505780001
Lembaga : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Unit Kerja : KECAMATAN
Sub Unit Kerja : KECAMATAN SAMARINDA KOTA
Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN BUGIS
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 5 Februari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ERMI RUSWANTI

NIK : 6472036007770006

Lembaga : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Unit Kerja : KECAMATAN

Sub Unit Kerja : KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN BUGIS

Jenis Laporan : Periodik - 2024

Tanggal Kirim : 2 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.